

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI ORGANISASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI
KABUPATEN WONOSOBO**

Oleh:

HAI DAR ROFI'

20140520026

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

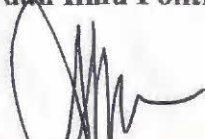
Dosen Pembimbing

Dr. Inu Kencana Syafie, S.IP., M.Si

NIDN: 0414075201

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**




Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN WONOSOBO

Haidar Rofi 1)*

1Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Bantul, DIY, 55183, Indonesia.

Inu Kencana Syafie 2)*

2Lecturer at the Departement of Governor science Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Eko Priyo Purnomo 3)

*3Lecturer at the Department of Governmental Studies and a fellow at Jusuf Kalla's School of Government (JKSG) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: eko@umy.ac.uk*

Abstact

Muhammadiyah as organization who had a mass and contribution in indonesia. Often hit by dilemma, in provide a leadership role if are in matters political, especially when-momentum of elections. This study aims to determine the role of muhammadiyah as society organizations and knows motion step Muhammadiyah during the process the election of the governor central java 2018 in Wonosobo Regency. This research uses the method descriptive qualitative and using a technique data purposive sampling. Sources lab data it comes from interviews and the questionnaire. Respondents who in interviewed is from regional leaders of Muhammadiyah in Wonosobo Regency, and the community of Wonosobo Regency. The result of this research had obtained an overview of the role of Muhammadiyah as society organisations in the election of the governor central java 2018.

Kata kunci: *Muhammadiyah's Role, Mass Organization The Election of The Governor Central Java 2018, Wonosobo Regency*

Abstrak

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai massa dan kontribusi besar di Indonesia. Sering dilanda dilematis, didalam memberikan peran jika dibenturkan dalam persoalan-persoalan politik, terutama disaat momentum-momentum pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dan mengetahui gerak langkah Muhammadiyah selama proses Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengambilan data purposive sampling. Sumber-sumber data penelitian ini berasal dari wawancara dan kuesioner. Responden yang di wawancarai adalah dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, dan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dari hasil penelitian ini telah diperoleh gambaran mengenai peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Kata kunci: *Peran Muhammadiyah, Organisasi Masyarakat, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Kabupaten Wonosobo*

*Penulis Korespondensi

E-mail: haidarcimprenk21@gmail.com, Telp: +6281228955226

PENDAHULUAN

Politik dijelaskan merupakan cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan. Dunia politik kerap kali menghadirkan pergulatan yang cukup menguras energi baik para politisi yang terlibat langsung maupun pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat di dalamnya. Tidak hanya masyarakat secara personal, institusi kemasyarakatan (organisasi) yang bergerak di luar politik juga terkena dampaknya (Maran dalam Susilo, 2003:4). Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab (Schei, 2009:23) .

Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, Berdasarkan Khittah Muhammadiyah tentang politik, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nashier menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan kekuatan politik mana pun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut "khittah" (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini (Haidar Nashier, 2008) .

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang (Makasar), Muhammadiyah menyatakan sikap untuk netral terhadap partai politik manapun yang mengikuti pemilihan umum. Sikap

netral terhadap partai politik bertujuan untuk menghindari konflik yang nantinya bisa merugikan Muhammadiyah, dikarenakan Muhammadiyah tidak bergerak dalam ranah politik praksis. Jika partai politik mempunyai sikap pragmatis, Muhammadiyah memiliki tujuan yang lebih luas yakni membangun umat. Akan tetapi sikap netral Muhammadiyah, secara organisasi maupun pribadi bukan berarti Muhammadiyah anti politik, karena bagaimanapun Muhammadiyah pasti akan terlibat dan terus bermain dalam kancah perpolitikan baik nasional maupun lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung (Setiawan, 2013: 38-46).

Muhammadiyah memberi dukungan kepada kadernya. Dukungan ini merupakan kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sebagai contoh Amien Rais yang merupakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), menjadikan PAN sebagai kendaraan untuk berjuang di ranah politik. Pencalonan Amien Rais melalui kendaraan Partai Amanat Nasional (PAN) menuai kendala karena harus memenuhi perolehan suara dalam pemilu legislatif sesuai ketentuan Undang-Undang Pilpres. Oleh sebab itu Muhammadiyah merasa memiliki kewajiban memberi dukungan kepada kadernya, dukungan ini juga merupakan wujud kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, secara tidak langsung PAN memperoleh rekomendasi dan legitimasi sebagai partai pilihan utama warga Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010).

Persoalan hubungan Muhammadiyah dengan politik memang selalu memunculkan dinamika tersendiri.

Proses pemilihan Kepala Daerah juga menimbulkan perilaku dan sikap yang beragam. Keberagaman pilihan politik memunculkan tarik ulur antara kepentingan politik personal, warga dan elitnya. Kecenderungan menarik lembaga Muhammadiyah untuk terjun langsung atau tetap pada posisi gerakan Islam menjadi tarik ulur antara dua kepentingan tersebut (Mukhlis, 2015: 21-22).

Pada bulan Mei, Menjelang Pilgub Jateng 2018, Tokoh Muhammadiyah dan mantan ketua MPR yaitu DR H Amien Rais yang menyempatkan ikut menyemarakkan kegiatan Gebyar Hari Bermuhammadiyah dalam gelaran Pengajian Akbar di Lapangan Desa Reco, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang diadakan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) tersebut, menghadirkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1995-1998 DR H Amien Rais. Dalam kesempatan itu, Amien Rais didampingi putra ketiganya, Ahmad Mumtaz Rais beserta istri.

"Penting warga Muhammadiyah berjihad politik agar warga Muhammadiyah lebih memahami lagi tentang permasalahan politik yang ada," ujar beliau.

Mantan Ketua MPR itu mengharapkan, dengan jihad politik tersebut pada akhirnya warga Muhammadiyah akan lebih bijaksana dalam ikut menentukan dan memilih seorang pemimpin. Senada, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Bambang Wen juga memberikan apresiasi kepada pemuda Muhammadiyah yang sukses menggelar kegiatan dengan menghadirkan tokoh

nasional seperti mantan Ketua MPR RI tersebut. "Ini sangat bagus sekali agar silaturahmi antarwarga Muhammadiyah terus terjalin dan bisa bertemu dengan tokoh nasional Muhammadiyah," tutur dia (<https://www.suaramerdeka.com>. 12/11/2018).

Pada perhelatan pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, juga memberikan daya tarik bagi Muhammadiyah dalam memberikan sikap sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai massa. Di lain sisi partai yang berdiri dari tokoh Muhammadiyah yaitu Partai Amanat Nasional, resmi memberikan dukungan kepada calon gubernur (cagub) Sudirman Said dalam Pilgub Jateng 2018. Bentuk dukungan ditandai dengan pemberian surat rekomendasi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Sudirman Said di Rakerwil II di Kyriad Grand Master Hotel Grobogan. SK yang diserahkan merupakan bentuk rekomendasi PAN kepada Sudirman Said. (Akrom Hazami, PAN resmi dukung sudirman said maju pilgub jateng 2018, <https://news.detik.com>, 01/04/2018).

Melihat beberapa persoalan tersebut, sikap politik dan peran Muhammadiyah didalam menghadapi Pemilihan Umum mengindikasikan adanya keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung didalam politik. Dalam penelitian ini berfokus pada Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo. Peran Muhammadiyah secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, yang dalam prosesnya ada

peranan dari para kader Muhammadiyah yang terjun dalam dunia politik dan juga masyarakat yang merasakannya. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan **Peran Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, yang dilakukan sebagai menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintergrasikan data ditempat penelitian secara objektif. Untuk mendapatkan data yang tepat sesuai apa yang diinginkan maka akan digunakan survei sebagai pengambilan data ke responden Kader Muhammadiyah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo. Unit analisa penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo serta masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orang tua/ anak yang ingin diselidiki (Bimo Walgito, 2010:72). Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan angket ini responden mudah memberikan jawaban karena alternatif jawaban sudah disediakan

dan membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya.

Teknik pengambilan kuesioner menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010) .

Langkah dalam menerapkan teknik ini adalah sebagai berikut:

1. Tentukan kriteria-kriteria untuk sampel.
2. Tentukan jumlah sampel berdasarkan studi kasus yang diteliti.
3. Tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria.

Setiap tingkat jawaban kuesioner penulis berikan jawaban bertingkat, akan tetapi tidak memberikan bobot pada setiap tingkat jawaban, karena penulis hanya menghitung beberapa banyak sample responden yang memiliki tingkat jawaban tersebut. Tingkat jawaban antara lain adalah

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. biasa saja
- d. kurang setuju
- e. tidak setuju sama sekali

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif sedangkan sumber data antara lain:

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara yang didapat dari narasumber atau informan yang mempunyai potensi dalam memberikan suatu informasi. Data primer sifatnya sangat subyektif karena berdasarkan pendapat pribadi. Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk

menganalisa data yang ditentukan. Data sekunder sifatnya lebih obyektif, karena sudah diolah oleh pihak ketiga yang dikumpulkan oleh peneliti melalui jurnal, karangan ilmiah dan lembaga hukum. Responden adalah subyek penelitian yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan analisis tersebut dimuka penulis dapat menyampaikan pembahasan antara lain sebagai berikut.

1. Hak Memilih Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 26 orang dengan presentase 57,7% Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 1 responden jika di prosentasekan 2,2%, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah menggunakan haknya dengan baik. Banyak responden yang menyampaikan tanggapan mereka dari berbagai arah sebagai pernyataan yang menunjukkan pendapat setuju dengan pernyataan bahwa hak memilih dalam menentukan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo.

masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam menggunakan hak memilihnya sudah baik, yang dimana kemajuan media menjadi salah satu peran penting dalam menentukan pilihan. Media adalah akses informasi yang sangat berguna. Oleh karena hal tersebut peran media sosial terhadap masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Media adalah jendela

dunia untuk setiap elemen masyarakat yang membutuhkan informasi terbaru dan benar terkait peristiwa yang terjadi termasuk politik.

Dalam perkembangannya, media massa memang sangat berpengaruh di wilayah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga politik.

Media dari aspek politik, media memberi ruang atau arena pertarungan bagi kepentingan berbagai kelompok sosial-politik yang ada dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu masyarakat juga harus cerdas dalam menerima akses informasi yang sangat mudah. Dengan memahi dan mencari sumber media yang valid. Karena media dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk dapat membangun opini yang benar terkait dengan peristiwa yang terjadi.

2. Peran Muhammadiyah Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang masyarakat peran Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 26 orang dengan persentase 57,7% Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 1 responden jika di presentasekan 0 %.

Banyak responden yang menyampaikan tanggapan mereka dari berbagai arah pernyataan yang menunjukkan pendapat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Muhammadiyah di sudah terlihat Kabupaten Wonosobo. Dapat di simpulkan bahwa para responden setuju dengan pernyataan Peran Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo. Ada beberapa tanggapan dari responden yang

memperkuat pernyataan setuju dengan peran Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo.

Sebagai organisasi masyarakat Islam, Muhammadiyah di Indonesia memainkan peran sosial yang penting di masyarakat. Jejak Muhammadiyah tertancap kuat di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun social organisasi ini berkaitan dengan ide pembaruan Islam. Ide yang digagas KH Ahmad Dahlan itu mencakup bidang yang luas, mulai dari praktik beragama hingga praktik sosial kemasyarakatan. Kini, Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia yang diorganisasikan secara modern. Unit kegiatannya tersebar merata ke seluruh pelosok negeri yang meliputi pendidikan, kesehatan, santunan sosial, hingga kegiatan ritual ibadah dan pengajian termasuk di Kabupaten Wonosobo.

3. Kewajiban Memilih Gubernur Jawa Tengah Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang kewajiban memilih Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018. Berdasarkan kuesioner yang sudah didapat menunjukkan bahwa responden kurang setuju. Berdasarkan 45 kuesioner, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 15 orang dengan persentase 33,3% Kemudian, jumlah responden yang memilih biasa saja 0 responden jika di presentasikan 0 %.

Berdasarkan responden yang kurang setuju menyatakan bahwa memilih gubernur adalah hak setiap warga negara yang menggunakannya bukan suatu kewajiban. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan kata hati mereka dan calon yang

mereka harapkan menjadi pemimpin bagi masyarakat. Oleh karena itu beberapa responden menyatakan bahwa memilih gubernur kurang tepat jika diartikan menjadi kewajiban. Akan tetapi sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi dalam sistem demokrasi Indonesia, sebagai warga negara yang baik kita harus menggunakan hak memilih sebaik-baiknya. Karena golput bukan suatu pilihan yang baik, dan tidak merubah sistem yang sudah ada.

4. Muhammadiyah Memberi Kewajiban Kadernya Memilih Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Wonosobo.

Pendapat responden tentang Muhammadiyah memberi kewajiban pada kadernya memilih Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa responden tidak setuju sama sekali. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih tidak setuju sama sekali, dengan jumlah responden yang memilih 18 orang dengan presentase 40 % Kemudian, jumlah responden yang memilih sangat setuju 2 responden jika di presentasikan 4,4% .

Berdasarkan data responden disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten wonosobo mengenal Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah. Akan tetapi juga mempunyai beberapa amal usaha yang bergerak di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Sedangkan dalam bidang politik Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah bersikap netral sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah dan tidak memberikan kewajiban untuk mendukung calon tertentu. Sikap politik Muhammadiyah menempatkan posisi

semua parpol yang mengusung calon Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sama saja.

Hal yang dapat dibenarkan adalah bahwa pilihan politik warga Muhammadiyah diserahkan kepada pribadi-pribadi yang memiliki kedekatan emosional dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa harus menyebutkan bahwa itulah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur resmi dari Muhammadiyah. Kesalahpahaman semacam ini harus disampaikan kepada publik dan warga Muhammadiyah karena jika tidak dilakukan, akan membuat antar sesama warga Muhammadiyah saling menelikung, saling menuduh, memfitnah, jika tak memilih pasangan calon yang dikehendaki politisi Muhammadiyah yang aktif di parpol tertentu.

5. Masyarakat Memilih Pemimpin Yang Baik (Amar Ma'ruf) Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang masyarakat memilih pemimpin yang baik (amar ma'ruf) di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 17 orang dengan presentase 27,4 % Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 0 responden jika di presentasekan 0 % .

Berdasarkan hasil wawancara responden menyatakan bahwa masyarakat yang baik tentunya akan memilih pemimpin yang amar ma'ruf (baik). Karena dengan pemimpin yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Dijelaskan juga oleh responden Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo bahwa Amar ma'ruf adalah

bahasa arab yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk kader Muhammadiyah dan masyarakat yang mengenal Muhammadiyah, mungkin sudah tidak asing dengan kalimat amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar diartikan menyeru manusia dan memberi contoh untuk melakukan kebaikan sedangkan Nahi Munkar artinya mencegah manusia atau diri sendiri untuk melakukan perbuatan buruk atau dosa.

Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar memiliki ruang lingkup/cakupan yang sangat luas. Ma'ruf meliputi seluruh perbuatan baik, sedangkan Munkar mencakup seluruh perbuatan buruk. Dalam ajaran Islam perbuatan Ma'ruf antara lain: mengamalkan rukun islam, jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, infak, silaturahmi, menghormati orang tua, terutama ayah dan ibu, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga hijab dan lainnya. Dalam pandangan Islam, menyeru kepada kebenaran dan menegakkannya, menafkahkan harta di jalan Allah swt, dan berjuang melawan kezaliman merupakan perbuatan penting yang ditekankan dalam Nahi Munkar.

Hal baik dapat kita lakukan kapan saja dan dimana saja. Hal tersebut menjadi pilihan bagi kita selama kita hidup dan dari situlah kita mendapat penilaian dari seseorang terhadap diri kita. Orang yang memilih untuk berperilaku baik pasti akan memberikan dampak yang baik terhadap orang disekitarnya.

6. Muhammadiyah Mengajukan Pemimpin Jujur Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang Muhammadiyah mengajukan pemimpin yang jujur di di Kabupaten Wonosobo. menunjukkan bahwa responden setuju. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden

paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 23 orang dengan presentase 51,1 %. Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 0 responden jika di presentasekan 0% .

Masyarakat Wonosobo berpendapat bahwa syarat mutlak bagi seorang pemimpin harus mempunyai sifat jujur. Pada dasarnya selain berprestasi, negeri ini membutuhkan pemimpin yang jujur. Pemimpin yang tidak munafik dan penuh kepura-puraan. Pemimpin yang peduli, simpati, empati, dan berbela rasa atas penderitaan yang dialami masyarakatnya. Pemimpin yang antikorupsi. Tidak ada ampun bagi seorang yang dipilih oleh rakyat ternyata setelah menjabat justru membohongi rakyat.

Muhammadiyah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pengikut Nabi Muhammad Saw. Rasulullah pernah bersabda, “Ada tiga kelompok yang pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan memandang mereka, dan mereka akan disiksa dengan azab yang sangat pedih (yaitu); “Orang tua yang berzina, penguasa yang bohong, dan orang miskin yang sombong.

7. Masyarakat Menurunkan Pemimpin Apabila Korupsi Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang masyarakat menurunkan pemimpin apabila korupsi di Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa responden setuju.

Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih biasa saja, dengan jumlah responden yang memilih 24 orang dengan prosentase 53,3% Kemudian, jumlah responden yang

memilih tidak setuju sama sekali 0 responden jika di presentasekan 0 %. Responden berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum yang sudah ada begitu juga sebaliknya dapat di katakan kejahatan. Kejahatan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, yang termasuk juga sebagai kejahatan luar biasa..Dan jika korupsi sudah terbukti seluruh pihak dari berbagai elemen seperti organisasi, komunitas dan masyarakat harus mengadukan ke lembaga hukum untuk diproses secara hukum.

8. Muhammadiyah Menganjurkan Kritik Pada Pemerintahan Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang Muhammadiyah menganjurkan kritik pada pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih biasa saja, dengan jumlah responden yang memilih 19 orang dengan prosentase 42,2% Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 2 responden jika di presentasekan 4,4%.

Penyampain kritik oleh Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo dirasa biasa saja oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kritik termasuk tindakan sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan, karena dengan kritikan akan memberikan analisa dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Dengan kritikan masyarakat dapat mengawal jalannya roda pemerintahan yang di sertai dengan uraian dan pertimbangan efektifif atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara

dari responden dipaparkan bahwa Gerak langkah organisasi Muhammadiyah tidak berfokus pada hal yang bersifat politik, walaupun tidak menutup kemungkinan ormas ikut andil dalam mengawal pemerintahan, tapi selama ini responden belum melihat ada gerakan kritik dari Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo.

9. Muhammadiyah Berpartisipasi Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang Muhammadiyah berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 22 orang dengan presentase 48,8 %. Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 2 responden jika di presentasekan 4,4 %.

Sikap politik Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo berlandaskan pada khittah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni politik kebangsaan, politik kebangsaan merupakan karakteristik politik Muhammadiyah yang telah dikembangkan sejak berdirinya Muhammadiyah dengan mendirikan amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penyantunan anak yatim dan kaum duafa. Banyaknya warga Muhammadiyah di berbagai parpol menunjukkan kedewasaan politisi warga Muhammadiyah. Akan tetapi Politisi yang berlatar Muhammadiyah tak memiliki klaim tunggal sebagai "putra mahkota" Muhammadiyah yang harus diusung dan didukung secara resmi oleh persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam konteks politik tinggi yang beradab, santun, dan bervisi, warga Muhammadiyah tak dibenarkan melakukan kampanye hitam terhadap calon yang diusung parpol mana pun, termasuk yang dianggap tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah memosisikan sebagai penyangga kekuatan civil Islam Indonesia yang harus didorong dan mendukung perkembangan masyarakat Islam yang toleran, humanis, dan inklusif. Sikap politik Muhammadiyah yang harus dipahami sebagai bagian penting Muhammadiyah dalam menjaga khittah Muhammadiyah yang sejak awal tak diagendakan jadi "gerakan politik praktis" dan sebagai parpol.

Hal ini karena Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting sebagai bagian dari gerakan civil Islam Indonesia yang selalu berupaya mengampanyekan perilaku politik beradab. Perilaku politik beradab Muhammadiyah tak hanya mengejar keuntungan material dan kekuasaan, tetapi juga terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku santun beretika dalam menjalankan tindakan politik praktis. Dengan memperhatikan sikap politik Muhammadiyah, maka tidak bisa dibenarkan jika pada suatu saat nanti jajaran elite parpol dengan serta-merta "memaksakan diri" agar para pengurus Muhammadiyah mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai pusat, mendukung salah satu pasangan. Akan tetapi sikap politik Muhammadiyah tersebut bukan berarti warga persyarikatan Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis dan mendukung pasangan calon yang dikehendaki atas dasar pribadi.

10. Kader Muhammadiyah Berpartisipasi Dalam Partai Politik Di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang kader Muhammadiyah yang berpartisipasi dalam partai politik di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju, dengan jumlah responden yang memilih 18 orang dengan presentase 40 % Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 2 responden jika di presentasekan 4,4%.

Sikap Kader Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo mengikuti sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Muhammadiyah secara institusi tetap istiqomah tak masuk ke politik praktis. Politik dalam sistem modern cukup diwakili partai politik dan elit partai politik. Meskipun, tidak terlibat politik praktis, namun kader ataupun warga Muhammadiyah dalam menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi rakyat berdasarkan hak pribadi atas keinginannya.

Penggunaan hak pilih juga dapat dilakukan dengan cara terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. Mengenai hal itu Muhammadiyah tidak ada larangan. Kader Muhammadiyah yang terlibat dalam parpol merupakan hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau terlibat dalam timses atau pemenangan di manapun itu bagian hak kewarganegarannya dan bukan terkait langsung dengan organisasi. Muhammadiyah akan tetap berada di koridor agar menjadi kekuatan keagamaan yang melakukan dakwah di tengah masyarakat. Muhammadiyah juga mendukung seluruh proses politik dan

kekuatan politik yang menjadi arena politik dengan etika tinggi membawa cita-cita bangsa. Tetapi yang tak kalah penting menjadikan negara Indonesia menjadi majemuk.

11. Gubernur Terpilih Mampu Memecahkan Masalah

Berdasarkan kuesioner yang didapat terkait pendapat responden tentang Gubernur terpilih mampu memecahkan masalah, menunjukkan bahwa responden biasa saja. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih biasa saja, dengan jumlah responden yang memilih 16 orang dengan prosentase 35,5% Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali 3 responden jika di presentasekan 6,6 %.

Respon menyatakan bahwa Gubernur tidak mampu memecahkan masalah jika tidak dekat dengan masyarakat. Provinsi Jawa Tengah meliputi berbagai kota dan kabupaten, Gubernur harus mengerti permasalahan dan dekat dengan masyarakat. Dikarenakan Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak mengerti pengikut yang berada di belakangnya yang membutuhkan dukungan dan kerjasama. Tanpa adanya pengikut maka pemimpin juga tidak bisa berjalan. Pemimpin dan pengikut adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, Gubernur harus mampu memimpin dan memahami seluruh kepentingan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara merata. Hal tersebutlah yang harus dibangun oleh Pihak Gubernur kepada pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Dengan kepemimpinan yang merata dan koordinasi

yang terarah dengan seluruh masyarakat, akan menghasilkan kebijakan yang jelas dan tepat untuk masyarakat.

12. Muhammadiyah Berkontribusi Dalam pemerintahan di Kabupaten Wonosobo

Pendapat responden tentang Muhammadiyah berkontribusi dalam pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan 45 kuesioner yang dibagikan, dapat di simpulkan bahwa responden paling banyak memilih biasa saja, dengan jumlah responden yang memilih 19 orang dengan presentase 42,2% Kemudian, jumlah responden yang memilih tidak setuju sama sekali dan sangat setuju masing 4 responden jika di presentasekan 8,8 %.

Responden berpendapat bahwa Muhammadiyah sebagai ormas tetap berada dibawah kepemimpinan pemerintahan. Kontribusi Muhammadiyah di Kabupaten wonosobo dalam pemerintahan diartikan sebagai bentuk sinergitas antara pemerintahan dengan organisasi masyarakat. Muhammadiyah yang berada di bawah kepemimpinan pemerintahan, sebagai organisasi masyarakat (ormas) harus turut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan dalam menyukseskan pembangunan sesuai dengan . Dikarenakan Membangun bangsa harus diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu maupun berkelompok. Ormas sebagai wadah berkumpulnya individu yang punya kesamaan visi dan misi, harus membantu negara dalam menyukseskan pembangunan bersama pemerintah.

KESIMPULAN

Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Gubernur

Jawa Tengah Tahun 2018 memiliki berbagai arah dari hasil kuesioner.

Sebagian besar responden setuju dengan pernyataan Peran Muhammadiyah sudah banyak terlihat di Kabupaten Wonosobo secara umum maupun secara politik. Sebagai organisasi masyarakat mempunyai amal usaha yang digunakan untuk kemajuan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Sebagai organisasi masyarakat Islam, Secara politik responden setuju dengan pertanyaan Muhammadiyah berpartisipasi dalam politik. Akan tetapi sikap politik Muhammadiyah, bukan atas nama warga persyarikatan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak berpolitik praktis dan mendukung pasangan calon yang dikehendaki atas dasar Muhammadiyah. Walaupun begitu Muhammadiyah tidak melarang kadernya untuk bergabung dengan partai politik atas kehendak pribadi dan berjihad dalam dunia politik melalui partai politik.

Gerak langkah Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan hasil kuesioner responden di Kabupaten Wonosobo menyatakn bahwa Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo sudah cukup efektif dalam amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan dengan berdirinya sekolah dan PKU yang bisa diakses oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurul dan Ng. Philipus. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baeur, Jeffry C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparisason of Attitudes In Germany And The United States*. Dissertasion, University of Cinniti, Clermont
- Jurdi, Syariffudin. 2010. *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. P. D. M. A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. In PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, A. (2004). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Samuel, H. Beer and Adam B. 1973. *Patterns of Government*. By eds. 3rd ed. New York: Random House
- Walgito, Bimo. 1999. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi offset
- Khoiri, Nispul. 2013 *Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah*. Sumatera Utara : Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara
- Mukhlis. 2015. *Perilaku politik elit keagamaan dalam politik lokal*. *Jurnal Online*, Vol 18 No 1
- Nashir, Haedar. 2008. *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Setiawan, A. 2013. *Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dalam politik nasional pasca orde baru tahun 1998-2010*. *POLITIKA : Jurnal Ilmu politik* 3.2 : 38-46.